

**FAKTOR KENERJA KEUANGAN DAN ANALISA RASIO
DALAM MENGUKUR EFEKTIVITAS
PENERIMAAN DAERAH**

(Study Kasus Kabupaten Merauke)

Richard Cristian Somalinggi Parantean, Hendrik Lembang,
Adam Gau Kamagai

**FUNGSI PENGUKURAN LIKUIDITAS TERHADAP
KESEHATAN PERUSAHAAN PT. X DI MERAUKE**

Ari Susanti, Marlina Manurung, Konstatina Dorkas

**INDEPENDENSI AUDITOR DAN KUALITAS
AUDIT PADA PT. X DI MERAUKE**

Ervina Dewi, Evelin Mary, Adam Gau Kamagai

**KONTRIBUSI RETRIBUSI TERHADAP APBD
KABUPATEN MERAUKE**

Yohanes Bosco Nambut, Maria Imakulata Mega Sari Waka,
Muhamad M Matdoan

Jurnal

MANAJEMEN & BISNIS

Jurnal Manajemen dan Bisnis merupakan jurnal ilmiah bagi para ahli manajemen bisnis dan akuntansi. Isi dan konten jurnal ini berdasarkan hasil penelitian, kajian pustaka dan analisa yang menggunakan metode ilmiah yang terukur.

Jurnal Manajemen dan Bisnis ini diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saint Theresa Merauke dengan jadwal penerbitan: dua kali dalam setahun yakni pada bulan Juli dan Desember.

Pelindung	: Badan Pengurus Yayasan LPK Saint Theresa
Penanggung jawab	: Yohanes Ngamal, SE.,M.Si
Dewan Redaksi	:
Ketua	: Henricus Raba, SE.,M.Si
Wakil ketua	: Inez Cara Alexander Phoek, B.Com.,M.M
Anggota	: Leonardus Budi Weluk, S.Pd.,M.M Fransiscus Saverinus Ngamel, S.Sos

Alamat Redaksi:

Jl. Nusa Barong, No.1, Merauke, Papua Tel. (0971)3333501
Email: stie.theresa@gmail.com

Sumbangan artikel ilmiah berbahasa Indonesia dan Inggris, karya asli (bukan jiplakan) dan belum pernah dipublikasikan. Dapat dikirim melalui email ke alamat: stie.theresa@gmail.com Dewan redaksi mengedit dan menyunting tanpa mengubah substansi setiap artikel ilmiah yang dikirim penulis.

DAFTAR ISI

ii

01

FAKTOR KENERJA KEUANGAN
DAN ANALISA RASIO
DALAM MENGUKUR EFEKIVITAS
PENERIMAAN DAERAH
(Study Kasus Kabupaten Marauke)
Richard Cristian Somalinggi
Parantean, Hendrik Lembang,
Adam Gau Kamagai

25

FUNGSI PENGUKURAN LIKUIDITAS
TERHADAP KESEHATAN
PERUSAHAAN PT. X DI MERAUKE
**Ari Susanti, Marlina Manurung,
Konstatina Dorkas**

31

INDEPENDENSI AUDITOR DAN
KUALITAS AUDIT PADA PT. X DI
MERAUKE
Ervina Dewi, Evelin Mary,
Adam Gau Kamagai

45

KONTRIBUSI RETRIBUSI TERHADAP APBD
KABUPATEN MERAUKE
Yohanes Bosco Nambut, Maria Imakulata
Mega Sari Waka,
Muhamad MMatdoan

FAKTOR KENERJA KEUANGAN DAN ANALISA RASIO DALAM MENGUKUR EFEKIVITAS PENERIMAAN DAERAH (Study Kasus Kabupaten Marauke)

Richard Cristian Somalinggi Parantean, Hendrik Lembang, Adam Gau Kamagai

HASIL penelitian dalam kasus ini menunjukan bahwa efektifitas pengaruh DAU terhadap rasio belanja daerah masih lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Dalam penelitian ini tergambar koefisien DAU lebih besar daripada koefisien PAD. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Marauke masih sangat tergantung dengan dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah Marauke belum sepenuhnya lepas dari ketergantungan pada dana pemerintah pusat di dalam mengatur rumah tangga daerahnya. Selain itu selama pelaksanaan otonomi daerah, data menunjukkan bahwa belum ada perkembangan yang signifikan atas usaha pemerintah Marauke untuk membangun kemandirian keuangan daerah. Porsi PAD yang merupakan salah satu komponen kemandirian daerah ternyata belum mampu ditingkatkan oleh pemerintah daerah, apalagi untuk menutup pembelanjaan pemerintah daerah.

Kata Kunci: DAU, PAD

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola kehidupan sosial, politik dan

ekonomi di Indonesia. Desentralisasi keuangan dan otonomi daerah merupakan wujud reformasi yang mengharuskan suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi (Mardiasmo, 2005: 18). Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Sesuai dengan teori *agency*, akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2005: 20) adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Sektor publik merupakan bagian yang mempunyai peranan vital dalam hal pengelolaan keuangan negara. Berbeda dengan sektor swasta yang bertujuan mencari laba, sektor publik lebih ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan publik. Pendanaan dalam sektor publik bersumber pada dana masyarakat, baik dari pajak atau retribusi, biaya yang dikenakan atas jasa publik, laba perusahaan milik negara, maupun sumber pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berlatar belakang hal tersebut, sektor publik diharapkan dapat mengelola keuangan negara dengan transparan dan mampu mewujudkan pelayanan

publik dengan standar pelayanan minimal.

Kontrol terhadap penggunaan dana publik wajib dilakukan. Seperti di sektor swasta, cara untuk mengontrol tersebut dilakukan salah satunya dengan menyusun anggaran. Dalam sektor publik, anggaran yang disusun bernama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (disingkat APBN untuk pemerintah pusat) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (disingkat APBD untuk pemerintah daerah). Anggaran tersebut agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya harus disusun dengan sungguh-sungguh dan tidak semata-mata sebagai formalitas.

Dalam APBD dapat diketahui bahwa pendapatan yang diperoleh daerah digunakan untuk membiayai belanja daerah. Pendapatan sendiri dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha mandiri daerah (Pendapatan Asli Daerah-selanjutnya disingkat dengan PAD) dan transfer dari pusat yang disebut Dana Perimbangan (terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus).

Beberapa penelitian telah dilakukan guna menguji pengaruh pendapatan terhadap belanja daerah. Beberapa di antaranya juga menguji kecenderungan pemerintah daerah yang lebih menggantungkan diri pada transfer dari pemerintah pusat (Dana Alokasi Umum-selanjutnya disingkat dengan DAU) dibandingkan berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya sendiri. Abdullah dan Halim (2003) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa/Bali.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara terpisah DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Secara bersamaan DAU dan PAD juga berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Sulistiyawan (2004) mereplikasi penelitian Abdullah dan Halim (2003) dengan sampel penelitian 65 Kabupaten/Kota dari 80 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Sulistiyawan menguji pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja pemerintah daerah dengan menggunakan regresi sederhana dan regresi berganda. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa DAU tahun yang bersangkutan dan DAU tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap

belanja daerah tahun yang bersangkutan. Demikian juga PAD tahun yang bersangkutan dan PAD tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap belanja daerah tahun yang bersangkutan. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian Abdullah dan Halim (2003). Daya prediksi DAU tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tahun yang bersangkutan kurang baik daripada daya prediksi DAU tahun yang bersangkutan terhadap belanja daerah tahun yang bersangkutan. Begitu pula, daya prediksi PAD tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tahun yang bersangkutan kurang baik daripada daya prediksi PAD tahun yang bersangkutan terhadap belanja daerah tahun yang bersangkutan. Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian Abdullah dan Halim. Sedangkan prediksi terjadinya *flypaper effect* menunjukkan bahwa pengaruh DAU tahun yang bersangkutan dan DAU tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tahun yang bersangkutan lebih besar daripada pengaruh PAD tahun yang bersangkutan dan PAD tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tahun yang bersangkutan. Hal ini konsisten dengan penelitian Abdullah dan Halim (2003), yaitu terjadi *flypaper effect*.

Penelitian Ndadari dan Adi (2008) menguji apakah ada kecenderungan perilaku asimetris Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota terhadap transfer pemerintah pusat yang diwujudkan dalam APBD. Penelitian ini menggunakan sampel 41 Kabupaten/ Kota di Indonesia, yaitu daerah yang memiliki data-data lengkap dan daerah yang tidak mengalami pemekaran. Hasil penelitian mereka menunjukkan adanya perilaku asimetris daerah dalam merespon transfer pemerintah pusat. Pemerintah Daerah memperlihatkan adanya perilaku asimetris dengan cara memanipulasi pengeluaran pemerintah setinggi mungkin dengan tidak mengupayakan maksimalisasi PAD agar nantinya dapat memperoleh bantuan berupa transfer pemerintah pusat.

Dari penelitian-penelitian di atas dapat diketahui bahwa pendapatan berpengaruh terhadap belanja daerah dan pemerintah daerah mempunyai kecenderungan untuk bergantung pada DAU dibandingkan mengoptimalkan PAD nya. Berlatar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia". Penelitian ini merupakan

replikasi dari penelitian sebelumnya. Perbedaan dari penelitian sebelumnya terletak pada sumber data yang berbeda, yaitu website Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (www.bpk.go.id) dan data yang berupa Laporan Realisasi Anggaran pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat BPK RI) untuk periode 2005-2008.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan penelitian berikut ini.

1. a. Apakah ada pengaruh DAU2008 terhadap Belanja Daerah2008?
- b. Apakah ada pengaruh DAU2007 terhadap Belanja Daerah2008?
- c. Apakah ada pengaruh DAU2006 terhadap Belanja Daerah2008?
- d. Apakah ada pengaruh DAU2005 terhadap Belanja Daerah2008?
2. a. Apakah ada pengaruh PAD2008 terhadap Belanja Daerah2008?
- b. Apakah ada pengaruh PAD2007 terhadap Belanja Daerah2008?
- c. Apakah ada pengaruh PAD2006 terhadap Belanja Daerah2008?
- d. Apakah ada pengaruh PAD2005 terhadap Belanja Daerah2008?
3. Apakah pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang hal-hal berikut ini.

1. Pengaruh DAU terhadap belanja pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia.
2. Pengaruh PAD terhadap belanja pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia.
3. Pengaruh DAU lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap belanja pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi praktisi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada pemerintah pusat dalam melakukan pengendalian atas transfer dana yang dilakukannya lewat DAU. Penting bagi Pemerintah Pusat untuk lebih giat menggali informasi mengenai potensi daerah dalam mengoptimalkan PAD-nya. Hal tersebut akan mendorong kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan mampu mendorong peranan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan potensi daerah dan meningkatkan PADnya.

2. Bagi akademisi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada literatur akuntansi pemerintahan dengan pengujian empirisnya terkait informasi yang relevan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Laporan Realisasi Anggaran Daerah

Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 22, struktur APBD terdiri dari sebagai berikut.

I. PENDAPATAN DAERAH

Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 23, pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari sebagai berikut ini.

- 1.1.1. Pajak daerah,
- 1.1.2. Retribusi daerah,
- 1.1.3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang mencakup sebagai berikut.

- I.1.3.1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD,
- I.1.3.2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan
- I.1.3.3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- I.1.4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup.
 - I.1.4.1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,
 - I.1.4.2. Jasa giro,
 - I.1.4.3. Pendapatan bunga,
 - I.1.4.4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah,
 - I.1.4.5. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah,
 - I.1.4.6. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
 - I.1.4.7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
 - I.1.4.8. Pendapatan denda pajak,
 - I.1.4.9. Pendapatan denda retribusi,
 - I.1.4.10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
 - I.1.4.11. Pendapatan dari pengembalian,
 - I.1.4.12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum,
 - I.1.4.13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan
 - I.1.4.14. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.

1.2 Dana Perimbangan.

Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 27, dana perimbangan dibagi menjadi.

- I.2.1. Dana Bagi Hasil (DBH), terdiri dari sebagai

berikut.

- I.2.1.1. Bagi hasil pajak, dan
- I.2.1.2. Bagi hasil bukan pajak.
- I.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU), dan
- I.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

1.3. Lain-lain pendapatan daerah yang mencakup.

- I.3.1. Hibah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali,
- I.3.2. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam,
- I.3.3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota,
- I.3.4. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah, dan
- I.3.5. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

2 BELANJA DAERAH

Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 23, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten atau kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja diklasifikasikan sebagai berikut.

§ Urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Belanja menurut urusan wajib mencakup.

- a. pendidikan,
- b. kesehatan,
- c. pekerjaan umum,
- d. perumahan rakyat,
- e. penataan ruang,
- f. perencanaan pembangunan,
- g. perhubungan,
- h. lingkungan hidup,
- i. pertanian,
- j. kependudukan dan catatan sipil,
- k. pemberdayaan perempuan,
- l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
- m. sosial,
- n. tenaga kerja,
- o. koperasi dan usaha kecil dan menengah,
- p. penanaman modal,
- q. kebudayaan,
- r. pemuda dan olah raga,
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,
- t. pemerintahan umum,
- u. kepegawaian,
- v. pemberdayaan masyarakat dan desa,
- w. statistik,
- x. arsip, dan
- y. komunikasi dan informatika.

Belanja menurut urusan pilihan mencakup hal-hal sebagai berikut.

- a. pertanian,
- b. kehutanan,
- c. energi dan sumber daya mineral,
- d. pariwisata,
- e. kelautan dan perikanan,
- f. perdagangan,
- g. perindustrian, dan
- h. transmigrasi.

§ Fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari hal-hal sebagai berikut.

- a. pelayanan umum,
- b. ketertiban dan ketentraman,
- c. ekonomi,
- d. lingkungan hidup,
- e. perumahan dan fasilitas umum,
- f. kesehatan,

- g. pariwisata dan budaya,
- h. pendidikan, dan
- i. perlindungan sosial.

§ Urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja mencakup hal-hal sebagai berikut.

a. Belanja tidak langsung, terdiri dari hal-hal berikut ini.

o Belanja pegawai.

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

o Bunga.

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

o Subsidi.

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu (perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat) agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

o Hibah.

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang

peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum. Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

o **Bantuan sosial.**

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

o **Belanja bagi hasil.**

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

o **Bantuan keuangan.**

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

o **Belanja tidak terduga.**

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan

bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

b. **Belanja langsung.**

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung terdiri dari hal-hal berikut ini.

o **Belanja pegawai.**

Belanja pegawai untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

o **Belanja barang dan jasa.**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

o **Belanja modal.**

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

3. PEMBIAYAAN DAERAH

Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 23, pembiayaan daerah meliputi semua transaksi

keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Defisit terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA),
 - b. pencairan dana cadangan,
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
 - d. penerimaan pinjaman daerah,
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan
 - f. penerimaan piutang daerah.
- Pengeluaran pembiayaan mencakup:

- a. pembentukan dana cadangan,
- b. penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah,
- c. pembayaran pokok utang, dan
- d. pemberian pinjaman daerah.

Secara lebih sederhana, Struktur APBD dapat dirinci sebagai berikut ini.

1. Pendapatan

- 1.1. Pendapatan Asli Daerah
 - 1.1.1. Pajak Daerah,
 - 1.1.2. Retribusi Daerah,
 - 1.1.3. Bagian Laba Usaha Daerah, dan
 - 1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
- 1.2. Dana Perimbangan
 - 1.2.1. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak,
 - 1.2.2. Dana Alokasi Umum, dan
 - 1.2.3. Dana Alokasi Khusus.
- 1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah
 - 1.3.1. Hibah,
 - 1.3.2. Dana Darurat,
 - 1.3.3. Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya,
 - 1.3.4. Dana penyesuaian dan dana OTSUS, dan
 - 1.3.5. Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya.

2. Belanja

- 2.1. Belanja Administrasi Umum,
- 2.2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan,

- 2.3. Belanja Modal,
- 2.4. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, dan
- 2.5. Belanja Tidak Tersangka.

3. Pembiayaan

- 3.1. Penerimaan Pembiayaan, dan
- 3.2. Pengeluaran Pembiayaan.

2. Dana Alokasi Umum

Menurut UU No. 25 tahun 1999, DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU ditetapkan minimal 25% dari penerimaan Dalam Negeri. 10% untuk DAU daerah provinsi, 90% untuk DAU daerah kabupaten/kota.

$$\text{DAU Provinsi} = \text{jml DAU seluruh provinsi} \times \text{bobot daerah provinsi yang bersangkutan}$$
$$\text{DAU Kab/Kota} = \text{jml DAU seluruh kab/kota} \times \text{bobot daerah kab/kota yang bersangkutan}$$

Menurut UU No. 32 tahun 2004, DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

3. Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No.25 tahun 1999, PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari potensi sumber daya yang ada di daerah. Sumber-sumber PAD meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dirinci menjadi sebagai berikut.

- a. Pajak Provinsi, yang terdiri atas hal-hal berikut ini.
 - Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
 - Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air.
 - Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- b. Pajak Kabupaten/ kota, yang terdiri atas sebagai berikut.
 - Pajak Hotel.
 - Pajak Restoran.
 - Pajak Hiburan.
 - Pajak Reklame.
 - Pajak penerangan Jalan.
 - Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C.
 - Pajak Parkir.
- c. Retribusi, yang terdiri atas sebagai berikut.
 - Retribusi Jasa Umum.
 - Retribusi Jasa Usaha.
 - Retribusi Perijinan Tertentu.

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah lainnya yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini terdiri atas hal-hal berikut ini.

- Bagian laba perusahaan milik daerah.
- Bagian laba lembaga keuangan bank.
- Bagian laba lembaga keuangan non bank.
- Bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

Sedangkan lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Pendapatan ini terdiri atas sebagai berikut.

- Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
- Penerimaan jasa giro.
- Penerimaan bunga deposito.
- Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

Menurut UU No. 32 tahun 2004, PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan

keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi

4. Belanja Daerah

Semua penerimaan dari rekening kas umum daerah, yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat dan pemerintahan di atasnya (pemerintah provinsi dan pemerintah pusat). Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Di dalam APBD belanja digolongkan menjadi lima kelompok berikut ini.

a. Belanja administrasi umum.

Belanja Administrasi umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis.

i. Belanja pegawai.

Belanja pegawai merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personal yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai.

ii. Belanja barang.

Belanja barang merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik

iii. Belanja perjalanan dinas.

Belanja perjalanan dinas merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.

iv. Belanja pemeliharaan.

Belanja pemeliharaan merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.

b. Belanja operasi, pemeliharaan sarana, dan prasarana publik.

Belanja operasi, pemeliharaan sarana, dan prasarana publik merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja terdiri atas sebagai berikut ini.

i. Belanja pegawai.

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personal yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel.

ii. Belanja barang.

Belanja barang merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

iii. Belanja perjalanan.

Belanja perjalanan merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

iv. Belanja pemeliharaan.

Belanja pemeliharaan merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik.

c. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal terdiri atas berikut ini.

i. Belanja publik.

Belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.

ii. Belanja aparatur.

Belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur.

d. Belanja Transfer.

Belanja Transfer merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut.

Belanja ini terdiri atas sebagai berikut.

- i. Angsuran pinjaman.
- ii. Dana bantuan.
- iii. Dana cadangan.

e. Belanja Tak Tersangka

Belanja Tak Tersangka merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa.

5. Website Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (www.bpk.go.id)

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempercepat proses perpindahan informasi. Semua informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dewasa ini sangat mudah diperoleh dengan menggunakan media internet. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menggunakan media ini untuk dapat melaporkan hasil pemeriksaan keuangannya terhadap provinsi, kota, dan kabupaten yang ada di seluruh penjuru Indonesia. BPK RI membuat sebuah website yang bukan saja berisi aktivitas pemeriksaan BPK namun juga aktivitas-aktivitas BPK yang lain, termasuk isu-isu yang sedang berkembang tentang perekonomian Indonesia.

Pada salah satu menu halaman website www.bpk.go.id, dapat dibaca laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah. Laporan hasil pemeriksaan tersebut terbagi menjadi dua semester. Masing-masing semester berisi laporan keuangan daerah yang telah diaudit beserta pendapat atau opini yang diberikan. Masyarakat yang membutuhkan, dapat mengunduh data tersebut secara cuma-cuma dan mempergunakannya untuk tujuan tertentu seperti penelitian dan sebagainya.

B. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten di Indonesia.

Kesiapan setiap daerah dalam menghadapi otonomi berbeda-beda. Bagi daerah yang kaya akan sumber daya, kesiapannya tentu lain dengan daerah yang miskin sumber daya. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, bagi daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya yang dapat diandalkan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kebijakan ini disambut baik, mengingat lepasnya campur tangan pemerintah akan memberikan kesempatan yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraannya (Adi, 2005). Berbeda dengan daerah yang tidak memiliki potensi yang memadai, kebijakan ini akan memberatkan karena daerah tersebut akan kesulitan membiayai belanja mereka. Wirawan dan Adi (2007) telah melakukan penelitian dan membuat peta kemampuan keuangan daerah sebelum maupun setelah otonomi. Peta keuangan daerah sebelum otonomi dimaksudkan untuk mengetahui persiapan keuangan daerah dalam rangka menghadapi otonomi daerah. Parameter yang digunakan adalah perhitungan dan analisis kinerja

PAD melalui ukuran *share*. *Share* merupakan rasio PAD terhadap total belanja daerah. Penelitian tersebut menyebutkan hanya 11 daerah yang memiliki kondisi ideal dan siap memasuki era otonomi dari 98 daerah yang diteliti.

Perbedaan kesiapan antar daerah tersebut yang akhirnya melahirkan kesenjangan horizontal antar pemerintah daerah dan kesenjangan vertikal antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sebagai solusi, pemerintah menetapkan alokasi transfer dana. Salah satu dari wujud alokasi transfer dana adalah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Daerah yang mempunyai kapasitas fiskal tinggi akan mendapat pasokan dana yang lebih kecil daripada daerah yang kapasitas fiskalnya rendah begitu sebaliknya. Masalah muncul ketika transfer dari pusat ini direspon berbeda oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah justru menjadi tergantung pada kucuran dana dari pusat tersebut. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh DAU terhadap belanja daerah, Abdullah dan Halim (2003) melakukan penelitian yang hasilnya menunjukkan adanya pengaruh positif DAU

terhadap belanja daerah, baik tanpa *lag* maupun dengan *lag*. Penelitian tersebut didukung dengan penelitian Sulistyawan (2004) yang hasilnya konsisten dengan hasil penelitian Abdullah dan Halim. Dari uraian di atas, peneliti akan melakukan pengujian tentang pengaruh DAU terhadap belanja daerah tanpa *lag* maupun dengan *lag* 1 tahun sampai 3 tahun. Hipotesis dirumuskan sebagai berikut ini.

- H1a: DAU2008 berpengaruh terhadap Belanja Daerah 2008 provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia.
- H1b : DAU2007 berpengaruh terhadap Belanja Daerah2008 provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia.
- H1c : DAU2006 berpengaruh terhadap Belanja Daerah 2008 provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia.
- H1d : DAU2005 berpengaruh terhadap Belanja Daerah 2008 provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia.

2 Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten di Indonesia

Pemberlakuan otonomi daerah pada tahun 2000 telah membawa dampak yang besar terhadap perekonomian daerah. Dalam TAP MPR No. IV/MPR/2000 ditegaskan sebagai berikut.

"Kebijakan desentralisasi Daerah diarahkan untuk mencapai peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreatifitas Pemda, keselarasan hubungan antara Pusat dan Daerah serta antar daerah itu sendiri dalam kewenangan dan keuangan untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan serta penciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian Daerah." Pemerintah daerah akhirnya mempunyai keleluasaan dalam meningkatkan kreatifitas untuk menggali potensi yang tidak mungkin dilakukan sebelum otonomi diberlakukan. Semua potensi daerah diupayakan dan dikembangkan agar dapat menghasilkan PAD yang dapat membantu untuk menutup belanja daerah. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari potensi sumber daya yang ada di daerah. Sumber-sumber PAD meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak dan retribusi daerah mempunyai proporsi terbesar dalam komponen

PAD, sehingga muncul anggapan bahwa PAD identik dengan pajak dan retribusi daerah.

Salah satu hasil penelitian Haryanto (2004) dinyatakan bahwa masih rendahnya kemampuan PAD yang dihasilkan daerah terkait dengan kewajibannya untuk membiayai pengeluaran rutin. Hanya 5 provinsi dan 4 kabupaten dan kota di Indonesia yang memiliki PAD lebih besar daripada kewajiban pembiayaan pengeluaran rutin di tahun 2000. Kurangnya kemampuan daerah dalam memaksimalkan potensi PADnya menjadikan daerah cenderung memiliki ketergantungan pada sumber pendanaan yang lain, yaitu DAU. Beberapa penelitian lain telah dilakukan untuk menguji pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Penelitian Abdullah dan Halim (2003) menunjukkan adanya pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Penelitian Sulistyawan (2004) juga mendukung hasil penelitian tersebut. Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut ini.

H2a : PAD2008 berpengaruh terhadap Belanja Daerah 2008 provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia.

H2b : PAD2007 berpengaruh terhadap Belanja Daerah 2008 provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia.

H2c : PAD2006 berpengaruh terhadap Belanja Daerah2008 provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia.

H2d : PAD2005 berpengaruh terhadap Belanja Daerah 2008 provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia.

3. Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten di Indonesia

Daerah-daerah di Indonesia masih menunjukkan ketergantungan yang sangat besar terhadap pemerintah pusat. Adi (2008) mengindikasikan bahwa ada kecenderungan untuk tetap mempertahankan (bahkan meningkatkan) transfer dari pemerintah pusat yang jumlahnya sangat besar, yaitu DAU. BPS (2004) dalam Adi (2008) menyatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan semakin kecilnya kontribusi PAD terhadap total belanja yaitu sebagai berikut.

1. masih adanya sumber pendapatan potensial yang dapat digali oleh Pemda akan tetapi berada di luar wewenang Pemda.
2. rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat yang tercermin dalam pendapatan per kapita.

3. kurang mampunya Pemda dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.

Penelitian tentang pengaruh DAU yang lebih kuat daripada PAD terhadap belanja daerah telah beberapa kali dilakukan. Wirawan dan Adi (2007) memberikan fakta empiris tidak adanya peningkatan *share* PAD terhadap belanja daerah. Penelitian Abdullah dan Halim (2003) menunjukkan bahwa pengaruh DAU lebih besar daripada PAD terhadap belanja daerah. Penelitian Sulistyawan (2004) juga menunjukkan hasil serupa. Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut ini.

H3: Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia lebih besar daripada pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2003), Sulistyawan (2004) dan Ndadari dan Adi (2008). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada sumber data yang berbeda dan data yang berupa Laporan Realisasi Anggaran pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia yang telah diaudit BPK RI untuk periode 2005-2008.

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh para peneliti, data yang diterbitkan dalam jurnal statistik dan lainnya, dan informasi yang tersedia dari sumber publikasi atau nonpublikasi entah di dalam atau luar organisasi, semua yang dapat berguna bagi peneliti (Sekaran, 2006). Dalam penelitian ini, data diambil dari laporan realisasi anggaran yang diterbitkan di www.bpk.go.id. Laporan realisasi anggaran tercantum di dalam laporan keuangan audit BPK RI. Laporan keuangan audit BPK RI yang digunakan hanyalah laporan keuangan yang memperoleh pendapat wajar dan pendapat wajar dengan pengecualian. Laporan dengan kedua pendapat tersebut diharapkan memuat data yang lebih dapat diandalkan karena telah

diaudit oleh BPK RI dan mendapat opini yang baik sehingga layak untuk dijadikan data penelitian. Periode waktu dibatasi pada data laporan keuangan auditan tahun 2005-2008.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diunduh mulai tanggal 1 Mei 2009 dan selesai pada tanggal 30 Mei 2009. Menurut waktunya, penelitian ini merupakan penelitian gabungan antara *times series* (penelitian dengan menggunakan dimensi satu waktu) dan *cross section* (penelitian dengan menggunakan beberapa objek penelitian).

B. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2002). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan realisasi anggaran provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia yang telah diaudit BPK RI tahun 2005-2008.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2002, 73). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah provinsi, kota dan kabupaten yang mempunyai laporan keuangan auditan BPK RI dengan pendapat wajar dan pendapat wajar dengan pengecualian untuk periode pemeriksaan tahun 2005-2008. Jadi, kriteria sampel yang digunakan oleh peneliti adalah berikut ini.

1. Laporan keuangan provinsi, kota, dan kabupaten yang terdapat di website BPK RI periode pemeriksaan BPK RI tahun 2005-2008.
2. Memperoleh pendapat wajar dan pendapat wajar dengan pengecualian dari BPK RI.
3. Memiliki data yang lengkap, tidak rusak, dapat diunduh dengan sempurna, dan dinyatakan sebagai hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sampling*. Teknik sampling bertujuan ini dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama menentukan provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia yang laporan realisasi anggarannya diterbitkan dalam website BPK RI. Tahap kedua, menentukan provinsi, kota

dan kabupaten di Indonesia yang laporan realisasi anggarannya memperoleh pendapat wajar dan pendapat wajar dengan pengecualian dari BPK RI. Tahap ketiga menyeleksi provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia yang mempunyai data DAU, PAD, dan belanja daerah yang lengkap, serta menghilangkan daerah yang mempunyai nilai DAU, PAD, dan belanja daerah yang sangat ekstrim. Nilai DAU, PAD, dan belanja daerah yang memiliki perbedaan yang sangat ekstrim akan mengganggu normalitas data sehingga data tersebut harus dihilangkan.

C. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data laporan realisasi anggaran yang tercantum di dalam laporan keuangan auditan BPK RI periode 2005-2008. Laporan yang digunakan hanyalah laporan keuangan yang memperoleh pendapat wajar dan pendapat wajar dengan pengecualian Laporan keuangan auditan BPK RI tersebut diunduh dari website BPK RI yaitu www.bpk.go.id.

D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, terdapat tiga variabel yang akan diuji pengaruhnya, yaitu DAU, PAD, dan belanja pemerintah daerah. Ketiga variabel tersebut digolongkan menjadi dua kelompok sebagai berikut.

I. Variabel terikat (*dependent variable*).

Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti (Sekaran, 2006). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah (BD). Total Belanja Daerah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan realisasi total belanja yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran daerah periode 2005-2008. Total belanja daerah tersebut meliputi semua komponen belanja, yaitu belanja aparatur dan belanja publik. Belanja aparatur terdiri dari belanja administrasi umum, biaya operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. Belanja publik meliputi belanja administrasi umum, biaya operasi dan pemeliharaan, belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak tersangka.

2. Variabel bebas (independent variabel)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, entah secara positif atau negatif. Ada dua variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nilai DAU adalah realisasi DAU yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran daerah periode 2005-2008. Total PAD adalah realisasi total PAD yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran daerah periode 2005-2008. Total PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan bagian laba perusahaan milik daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

E Metode Analisis Data

Alat analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi sederhana dan berganda (*multiple regression*). Regresi sederhana dilakukan tanpa lag maupun dengan lag 1 tahun sampai 3 tahun. Regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh seluruh variabel independen yang ada (DAU dan PAD) terhadap belanja daerah secara bersama. Data diolah dengan bantuan software SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) version 11.5 for Windows.

Model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Untuk menjawab Hipotesis 1a sampai dengan 1d

$$\text{Belanja Daerah} = a + b \text{ Dana Alokasi Umum} + \varepsilon$$

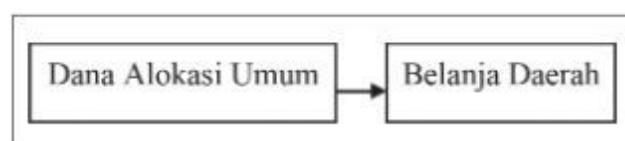
Untuk menjawab Hipotesis 2a sampai dengan 2d

$$\text{Belanja Daerah} = a + b \text{ Pendapatan Asli Daerah} + \varepsilon$$

Untuk menjawab Hipotesis 3

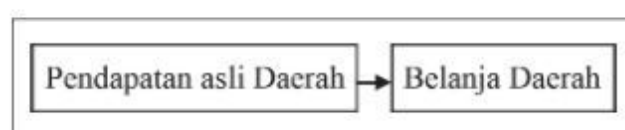
$$\text{Belanja Daerah} = a + b \text{ Dana Alokasi Umum} + c \text{ Pendapatan Asli Daerah} + \varepsilon$$

Model penelitian untuk melihat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja daerah dapat digambarkan sebagai berikut.



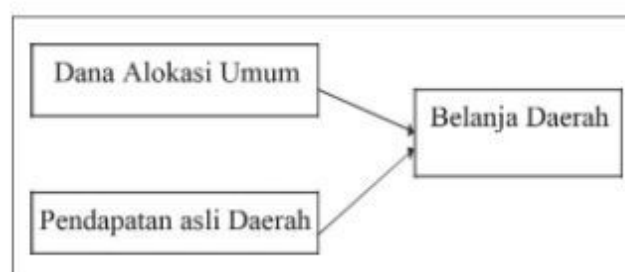
Gambar 1
Model Penelitian Pengujian Hipotesis Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah

Model penelitian untuk melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2
Model Penelitian Pengujian Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah

Model penelitian untuk melihat pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3
Model Penelitian Pengujian Hipotesis Pengaruh DAU lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah

Tahap analisis data adalah sebagai berikut ini.

1. Analisis Deskriptif Statistik

Penggambaran data untuk mengetahui N (banyaknya data yang diolah), nilai minimum dan maksimum data, nilai tengah atau rerata, dan deviasi standar masing-masing variabel penelitian.

2. Uji Asumsi Klasik a. Uji Normalitas

Uji Normalitas (Ghozali, 2006: 110) bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis sebagai berikut.

i. Analisis grafik.

Dilakukan dengan cara melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Cara lain untuk uji normalitas dengan analisis grafik adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut.

- Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

ii. Analisis statistik

Menurut Ghozali (2006: 112), uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Maka perlu didukung dengan adanya uji statistik sederhana dengan cara melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual ataupun dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Data dikatakan berdistribusi normal apabila kurtosis dan skewness mendekati nol. Dalam uji Kolmogorov-Smirnov, data dikatakan berdistribusi normal apabila lebih besar daripada angka signifikansi 0,05 begitu pula sebaliknya.

b. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas (Ghozali, 2006: 91) bertujuan

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut ini.

- Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinieritas. Multikolinieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.
- Multikolinieritas dapat juga dilihat dari hal-hal berikut ini.
 - Nilai tolerance dan lawannya.
 - *Variance inflation factor* (VIF)

Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance $< 0,10$, atau sama dengan nilai $VIF > 10$.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi (Ghozali, 2006: 95) bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat digunakan uji Runs-Test. Dalam uji Runs-Test data dikatakan bebas autokorelasi kalau signifikansinya lebih dari 0,05.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas (Ghozali, 2006: 105) bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda maka disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi Heteroskedastisitas. Terjadi tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari grafik *scatterplot*. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut.

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

F. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda (*multiple regression*). Hipotesis diterima jika probabilitas $< 0,05$. Langkah-langkah pengujian hipotesis dilakukan sebagai berikut ini.

1. Menentukan hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut ini.

- a. H_{01a} : DAU2008 tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah2008 provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia, atau $H_{01a} = a = 0$.

H_{A1a} : DAU2008 berpengaruh terhadap Belanja Daerah2008 provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia, atau $H_{A1a} = a \neq 0$.

- b. H_{01b} : DAU2007 tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah2008 provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia, atau $H_{01b} = a = 0$.

H_{A1b} : DAU2007 berpengaruh terhadap Belanja Daerah2008 provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia, atau $H_{A1b} = a \neq 0$.

- c. H_{01c} : DAU2006 tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah2008 provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia, atau $H_{01c} = a = 0$.

H_{A1c} : DAU2006 berpengaruh terhadap Belanja Daerah2008 provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia, atau $H_{A1c} = a \neq 0$.

- d. H_{01d} : DAU2005 tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah2008 provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia, atau $H_{01d} = a = 0$.

H_{A1d} : DAU2005 berpengaruh terhadap Belanja Daerah2008 provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia, atau $H_{A1d} = a \neq 0$.

- e. H_{02a} : PAD2008 tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah2008 provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia, atau $H_{02a} = a = 0$.

H_{A2a} : PAD2008 berpengaruh terhadap Belanja Daerah2008 provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia, atau $H_{A2a} = a \neq 0$.

- f. H_{02b} : PAD2007 tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah2008 provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia, atau $H_{02b} = a = 0$.

H_{A2b} : PAD2007 berpengaruh terhadap Belanja Daerah2008 provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia, atau $H_{A2b} = a \neq 0$.

- g. H_{02c} : PAD2006 tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah₂₀₀₈ provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia, atau $H_{02c} = a = 0$.

H_{A2c} : PAD2006 berpengaruh terhadap Belanja Daerah2008 provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia, atau $H_{A2c} = a \neq 0$.

- h. H_{02d} : PAD₂₀₀₅ tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah₂₀₀₈ provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia, atau $H_{02d} = a = 0$.

H_{A2d} : PAD2005 berpengaruh terhadap Belanja Daerah2008 provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia, atau $H_{A2d} = a \neq 0$.

- i. H_{03} : Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia lebih besar daripada pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia.

- Menentukan tingkat signifikansi α sebesar 0,05.
- Menentukan kriteria penerimaan hipotesis dan penarikan kesimpulan hipotesis.
Jika $p < \alpha$ maka H_0 ditolak, dan H_A diterima. Jika $p > \alpha$ maka H_0 tidak ditolak, dan H_A ditolak.

BAB IV ANALISIS DATA

A DESKRIPSI DATA

1. Pengumpulan dan Penentuan Sampel

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja daerah. Sumber data yang digunakan oleh peneliti berasal dari website BPK (www.bpk.go.id). Data tersebut berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diaudit oleh BPK RI untuk periode pemeriksaan tahun 2005-2008. Dari sumber data tersebut, data jumlah provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia yang berhasil dikumpulkan peneliti adalah sebagai berikut ini.

Tabel 1
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia dalam website BPK RI periode 2005-2008

Daerah	2005	2006	2007	Total 2005 s.d. 2008	
Provinsi	32	32	33	34	131
Kabupaten	192	259	339	350	1,140
Kota	66	72	83	88	309
Jumlah	290	363	455	472	1,580

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari data di atas, diperoleh populasi sebanyak 1.580 daerah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia yang telah diperiksa BPK RI pada tahun 2005-2008. Sedangkan, data yang akan digunakan oleh peneliti sebagai sampel adalah data Realisasi Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah yang telah diaudit oleh BPK pada tahun 2005-2008 serta dinyatakan mempunyai pendapat wajar dan pendapat wajar dengan pengecualian. Data mengenai pendapat BPK terhadap laporan keuangan provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia tersebut dapat dilihat sebagai berikut ini.

Tabel 2
Pendapat BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia periode 2005-2008

Daerah	Pendapat	Total 2005 s.d. 2005 2006 2007 2008 2008				
		2005	2006	2007	2008	2008
Provinsi	tidak menyatakan pendapat	1	1	4	7	13
	tidak wajar	2	1	4	3	10
	Wajar	3	1	1	1	6
	wajar dengan pengecualian	21	22	16	16	75
	Lain-lain ¹	5	7	8	7	27
Kota	tidak menyatakan pendapat	1	1	11	13	26
	tidak wajar	0	2	2	9	13
	Wajar	5	6	1	2	14
	wajar dengan pengecualian	52	54	56	47	209
	Lain-lain	8	9	13	17	47
Kabupaten	tidak menyatakan pendapat	5	14	55	83	157
	tidak wajar	7	7	18	40	72
	Wajar	10	8	2	1	21
	wajar dengan pengecualian	158	168	201	185	712
	Lain-lain	12	62	63	41	178
Jumlah		290	363	455	472	1580

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari data di atas, diperoleh sampel sebanyak 41 provinsi, kota, dan kabupaten yang diberi pendapat wajar dan 996 provinsi, kota, dan kabupaten yang diberi pendapat wajar dengan pengecualian oleh BPK sehingga total ada 1.037 provinsi, kota, dan kabupaten. Namun, dari 1.037 daerah tersebut, hanya 228 daerah yang layak dijadikan sampel karena daerah-daerah itulah yang memiliki nilai DAU, PAD, dan belanja daerah yang normal. Data sejumlah 228 tersebut dikelompokkan menjadi 4 tahun sehingga ada 57 daerah provinsi, kota dan kabupaten yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Daerah yang memiliki nilai DAU, PAD, dan belanja daerah yang ekstrim tidak disertakan dalam penelitian ini. Data

¹ Lain-lain meliputi laporan keuangan auditan yang tidak disertai dengan halaman pendapat atau mempunyai data yang tidak lengkap atau rusak, kerusakan teknis saat mengupload data, laporan keuangan daerah dengan tujuan tertentu (SPI, Kinerja, Pilkada), dan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

yang diambil dari sampel tersebut berupa data DAU, PAD dan Belanja Daerah. Data mentah mengenai DAU, PAD dan Belanja Daerah dapat dilihat dalam lampiran 1. Selanjutnya, sampel data dari 57 daerah yang dapat dilihat dalam lampiran 2 diolah dengan menggunakan analisis regresi sederhana dan berganda.

2. Deskripsi Statistik

Peneliti kemudian mengadakan pengolahan data mentah yang ada pada lampiran 2. Sebelum diolah, data tersebut (total DAU, PAD, dan Belanja Daerah) dikonversi ke dalam milyar rupiah. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengolahan data. Hasil analisis deskriptif dapat dilihat sebagai berikut ini.

Tabel 3
Hasil Deskripsi Statistik

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja	228	123.32	874.89	374.35	151.98
Dana Alokasi Umum (DAU)	228	59.82	694.21	277.15	121.95
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	228	7.05	140.37	33.15	26.71
Valid N (listwise)	228				

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Hasil pengolahan data menunjukkan adanya 228 daerah dengan Belanja minimum sebesar Rp.123.310.000.000,- dan maksimum sebesar Rp.874.890.000.000,-. Rata-rata Belanja yang diambil sebesar Rp.374.350.000.000,-. Minimum DAU sebesar Rp.59.820.000.000,- dan maksimum DAU sebesar Rp.694.210.000.000,-. Rata-rata DAU sebesar Rp.277.150.000.000,-. Sementara itu, minimum PAD sebesar Rp.7.050.000.000,- dan maksimum PAD sebesar Rp.140.370.000.000,-. Rata-rata PAD sebesar Rp.33.150.000.000,-.

B. HASIL ANALISIS DATA

1. Pengujian Asumsi Klasik a. Uji Normalitas

Uji Normalitas (Ghozali, 2006: 110) bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti yang telah diketahui, uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Data yang baik adalah data yang memenuhi asumsi normalitas atau berdistribusi normal. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dalam uji Kolmogorov-Smirnov, data dikatakan berdistribusi normal apabila lebih besar daripada angka signifikansi 0,05 begitu pula sebaliknya. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		228
Normal Parameters (a,b)	Mean	.0000000
	Std. Deviation	41.15969911
Most Extreme Differences	Absolute	.081
	Positive	.081
	Negative	-.060
Kolmogorov-Smirnov Z		1.230
Asymp. Sig. (2-tailed)		.097

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel hasil pengujian normalitas menunjukkan angka signifikansi lebih dari 0.05 maka dapat disimpulkan data terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas (Ghozali, 2006: 91) bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam penelitian ini adalah

dengan melihat nilai tolerance dan VIFnya. Jika nilai tolerance > 0.10 . atau nilai VIF < 10 , dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas. Hasil pengujian terhadap multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Dana Alokasi Umum (DAU)	0.792	1.263	Tidak terjadi multikolinieritas
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0.792	1.263	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel hasil pengujian multikolinieritas menunjukkan angka tolerance 0.792 (lebih dari 0.10) dan VIF 1.263 (kurang dari 10). Kesimpulan yang dapat diambil dari uji multikolinieritas adalah bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi (Ghozali, 2006: 95) bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Dalam penelitian ini, pengujian autokorelasi dilakukan dengan Runs-Test. Data dikatakan memenuhi asumsi autokorelasi jika nilainya lebih dari 0.05. Hasil pengujian terhadap autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6
Hasil Uji Autokorelasi dengan Runs-Test

	Unstandardized Residual
Test Value (a)	-2.07368
Cases $<$ Test Value	114
Cases $\geq$ Test Value	114
Total Cases	228
Number of Runs	110
Z	-.664
Asymp. Sig. (2-tailed)	.507

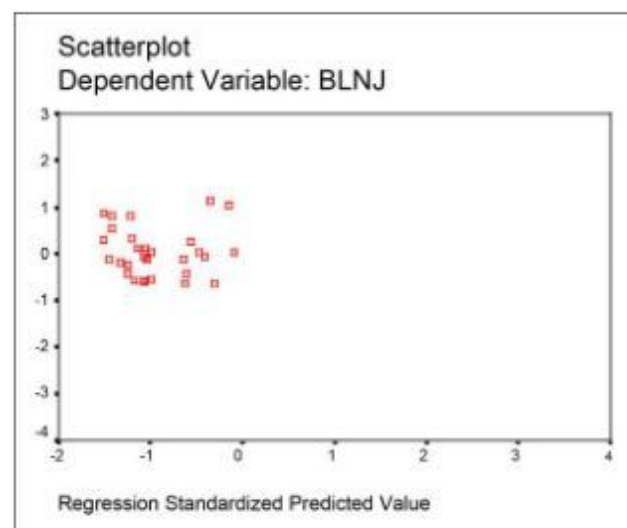
a. Median

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel hasil pengujian autokorelasi dengan Runs-Test menunjukkan angka signifikansi lebih dari 0.05 maka dapat disimpulkan data bebas autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas (Ghozali, 2006: 105) bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda, hal itu disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian terjadi tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik scatterplot berikut ini.



Grafik 1 Scatterplot

Dari grafik scatterplot di atas, dapat dilihat bahwa tidak terdapat pola yang jelas serta tidak dijumpai titik-titik mengumpul di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

2 Pengujian Hipotesis

Pengujian pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah dilakukan dengan dua model regresi, baik regresi tanpa lag maupun regresi dengan lag 1 tahun sampai 3 tahun. Regresi tanpa lag digunakan untuk menguji pengaruh DAU2008 terhadap Belanja Daerah 2008.

Tabel 7
Hasil Regresi Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah

	Variabel	b	thit	F	probabilitas	Adj. R2
Regresi tanpa lag						
Pengaruh DAU2008 terhadap Belanja Daerah2008	(Constant)	74.555	3.210	378.797	0.002 *	0.871
	DAU2008	1.171	19.463		0.000 *	
Regresi dengan lag 1 tahun						
Pengaruh DAU2007 terhadap Belanja Daerah2008	(Constant)	94.796	3.722	287.552	0.000 *	0.837
	DAU2007	1.234	16.957		0.000 *	
Regresi dengan lag 2 tahun						
Pengaruh DAU2006 terhadap Belanja Daerah2008	(Constant)	131.698	5.079	233.530	0.000 *	0.806
	DAU2006	1.789	15.282		0.000 *	
Regresi dengan lag 3 tahun						
Pengaruh DAU2005 terhadap Belanja Daerah2008	(Constant)	143.047	4.530	140.310	0.000 *	0.723
	DAU2005	1.791	12.137		0.000 *	

* signifikan pada $\alpha = 1\%$ Sumber: Hasil Pengolahan Data

Sedangkan regresi dengan lag digunakan untuk menguji pengaruh DAU2007 terhadap Belanja Daerah 2008, pengaruh DAU2006 terhadap Belanja Daerah 2008, pengaruh DAU2005 terhadap Belanja Daerah 2008. Hasil kedua model regresi dapat dilihat tabel 7 sebagai berikut.

Dari hasil pengujian di atas dapat diketahui bahwa DAU berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah, baik yang dilakukan tanpa lag maupun dengan lag 1 tahun sampai 3 tahun. Hasil tersebut konsisten dengan hasil penelitian Sulistyawan (2004) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah tanpa lag maupun dengan lag. Ketika kedua regresi dibandingkan diperoleh nilai t dan

adjusted R² yang lebih besar pada regresi tanpa lag. Hal ini menjelaskan bahwa daya prediksi DAU tahun-tahun sebelumnya terhadap Belanja Daerah tahun ini kurang baik bila dibandingkan dengan daya prediksi DAU tahun ini terhadap Belanja Daerah tahun ini.

Pengujian pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah juga dilakukan dengan dua model regresi, yaitu regresi tanpa lag dan regresi dengan lag 1 tahun sampai 3 tahun. Regresi dengan lag digunakan untuk menguji pengaruh PAD2007 terhadap Belanja Daerah 2008, pengaruh PAD 2006 terhadap Belanja Daerah2008, pengaruh PAD2005 terhadap Belanja Daerah 2008. Hasil model regresi tanpa lag dan dengan lag dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 8
Hasil Regresi Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah

	Variabel	b	thit	F	probabilitas	R2
Regresi tanpa lag						
Pengaruh PAD2008 terhadap Belanja Daerah2008	(Constant)	389.244	13.795	25.615	0.000 *	0.305
	PAD2008	2.773	5.061		0.000 *	
Regresi dengan lag 1 tahun						
Pengaruh PAD2007 terhadap Belanja Daerah2008	(Constant)	398.649	13.946	21.370	0.000 *	0.267
	PAD2007	2.907	4.623		0.000 *	
Regresi dengan lag 2 tahun						
Pengaruh PAD2006 terhadap Belanja Daerah2008	(Constant)	411.664	15.073	19.367	0.000 *	0.247
	PAD2006	3.159	4.401		0.000 *	
Regresi dengan lag 3 tahun						
Pengaruh PAD2005 terhadap Belanja Daerah2008	(Constant)	407.401	14.632	19.799	0.000 *	0.251
	PAD2005	3.787	4.45		0.000 *	

* signifikan pada $\alpha = 1\%$ Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari hasil pengujian di atas dapat diketahui bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah, baik yang dilakukan tanpa *lag* maupun dengan *lag*. Hasil tersebut konsisten dengan hasil penelitian Sulistyawan (2004) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah tanpa *lag* maupun dengan *lag*. Ketika kedua regresi dibandingkan diperoleh nilai *t* dan adjusted R^2 yang lebih besar pada regresi tanpa *lag*. Hal ini menjelaskan bahwa daya prediksi PAD tahun-tahun sebelumnya terhadap Belanja Daerah tahun ini kurang baik bila dibandingkan dengan daya prediksi PAD tahun ini terhadap Belanja Daerah tahun ini.

Pengujian terhadap pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja daerah secara bersama dilakukan dengan regresi berganda. Hasil regresi berganda terhadap data tahun 2008 adalah sebagai berikut.

Tabel 9
Hasil Regresi Berganda Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah

Variabel	b	thit	probabilitas
(Constant)	74.510	3.600	0.001
DAU2008	1.067	17.848	0.000 *
PAD2008	0.916	3.903	0.000 *
Adj. R2 = 0.897 F = 246.028 P = 0.000*			

*signifikan pada $\alpha = 1\%$ Sumber: Hasil Pengolahan Data

Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut ini.

$$Y = 74.510 + 1.067 X_1 + 0.916 X_2$$

Dimana,

Y = Belanja Daerah,

X_1 = Dana Alokasi Umum (DAU), dan

X_2 = Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil uji ANOVA menunjukkan F hitung sebesar 246.028 dengan tingkat signifikansi 0.000. Tingkat probabilitasnya lebih kecil dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel (baik DAU maupun PAD) secara signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Koefisien DAU sebesar 1.067 dengan angka signifikansi 0.000 menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja daerah. Koefisien DAU sebesar 1.067 juga menunjukkan setiap kenaikan DAU sebesar Rp. 1.000,- akan meningkatkan belanja daerah sebesar Rp.1.067,-. Koefisien PAD sebesar 0.916 dengan angka signifikansi 0.000 menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja daerah. Koefisien PAD sebesar 0.916 juga menunjukkan setiap kenaikan PAD sebesar Rp. 1.000,- akan meningkatkan belanja daerah sebesar Rp.916,-.

Dalam analisis regresi berganda, yang digunakan sebagai koefisien determinasi adalah adjusted R^2 . Dalam penelitian ini, koefisien determinasi sebesar 0.897 maka dapat disimpulkan bahwa 89.7 % besar Belanja Daerah dijelaskan oleh variabel DAU dan PAD. Sedangkan 10.3 % disebabkan oleh faktor-faktor yang lain.

C. PEMBAHASAN

Penelitian ini mereplikasi penelitian Sulistyawan (2004) yang menggunakan analisis regresi sederhana dan berganda untuk menguji pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja daerah. Ada tiga variabel yang diuji, yaitu belanja daerah sebagai variabel dependen, DAU dan PAD sebagai variabel independen. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Dari pengujian asumsi klasik, dapat diketahui bahwa uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, maupun uji heteroskedastisitas telah terpenuhi.

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini, didapat bukti empiris yang mendukung hipotesis Ia yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja daerah. Bukti empiris juga mendukung hipotesis Ib sampai Id yang menyatakan bahwa DAU tahun-tahun sebelumnya berpengaruh terhadap belanja daerah. Ketika dibandingkan, regresi tanpa *lag* lebih kuat dalam mempengaruhi belanja daerah dibandingkan regresi dengan *lag*. Hal ini menunjukkan bahwa DAU tahun ini lebih berpengaruh terhadap belanja daerah dibandingkan DAU tahun lalu. Hasil ini konsisten dengan penelitian Sulistyawan (2004) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja pemerintah

daerah, baik dilakukan regresi dengan atau tanpa *lag*. Hal ini menegaskan bahwa semakin besar DAU, semakin besar pula jumlah belanja pemerintah daerah yang dikeluarkan. Hasil pengujian hipotesis juga mendukung hipotesis 2a yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa PAD secara statistik berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja daerah, yang ditunjukkan dengan probabilitas < 0.05 yaitu 0.000. Hipotesis 2b sampai 2d juga didukung oleh hasil penelitian ini, yang menyatakan bahwa PAD tahun-tahun sebelumnya berpengaruh terhadap belanja daerah. Ketika dibandingkan, regresi tanpa *lag* lebih kuat dalam mempengaruhi belanja daerah dibandingkan regresi dengan *lag*. Hal ini menunjukkan bahwa PAD tahun ini lebih berpengaruh terhadap belanja daerah dibandingkan PAD tahun lalu. Hal ini konsisten dengan penelitian Sulistyawan (2004) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja pemerintah daerah, baik dilakukan regresi dengan atau tanpa *lag*. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin besar perolehan PAD suatu daerah, maka semakin besar pula jumlah belanja pemerintah daerah tersebut.

Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap belanja daerah didukung oleh bukti empiris dalam penelitian ini. Koefisien DAU (1.067) lebih besar daripada koefisien PAD (0.916) sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Hal ini sejalan dengan data di lapangan yang menunjukkan bahwa banyak daerah masih tergantung dengan dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat (Antara News, 28 Oktober 2009; *Bisnis Indonesia*, 24 November 2009; *Solopos*, 16 Desember 2009).

Meskipun otonomi daerah sudah dilakukan selama kurang lebih sembilan tahun, kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat di dalam mengatur rumah tangga daerah (Mahendra, 2009). Pada tahun 2001, setahun setelah dilakukan otonomi daerah, dari 13 daerah yang diteliti oleh Lembaga Kajian Otonomi Daerah Suara Merdeka (LKOD-SM), tidak ada daerah pun yang kontribusi PAD-nya mencapai 10 % dari total APBD (Suara Merdeka, 26 Juli 2005). Beberapa tahun

berikutnya, pada tahun 2009, dari 33 provinsi serta 452 kabupaten dan kota yang diteliti, besarnya PAD suatu daerah pada umumnya hanya dapat menyumbang 7,4 % dari seluruh anggaran belanja daerah masing-masing. Data itu menunjukkan bahwa 92.6% anggaran belanja daerah dibiayai oleh Dana Perimbangan (Sitohang, 2009). Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah belum secara serius mengembangkan PAD dan masih sangat bergantung kepada transfer pemerintah pusat. Selama ini pemerintah daerah sibuk meningkatkan PAD dengan cara menaikkan atau menggalakkan pajak yang justru akan semakin membebani masyarakat. Peningkatan PAD yang baik harus tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan publik.

BAB V KESIMPULAN, SARAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI

A. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja daerah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia. Sampel penelitian yang digunakan adalah laporan keuangan dari 228 provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia yang dikelompokkan dalam 4 tahun. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh BPK RI serta diberikan pendapat wajar dan wajar dengan pengecualian. Cara untuk mendapatkan laporan tersebut dilakukan dengan mengunduh dari website BPK RI www.bpk.go.id.

Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan angka Kolmogorov-Smirnov 0.97 sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal. Uji multikolinieritas menunjukkan angka toleransi 0.792 dan VIF 1.263 mendukung kesimpulan yang menyebutkan asumsi multikolinieritas terpenuhi. Uji autokorelasi menghasilkan angka Runs-Test 0.507 yang menunjukkan bahwa asumsi autokorelasi juga terpenuhi. Uji heteroskedastisitas yang ditunjukkan oleh grafik scatterplot menunjukkan tidak terjadinya heteroskedastisitas.

Hasil pengujian hipotesis 1a menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja daerah. Hasil pengujian hipotesis 1b sampai 1d

menunjukkan bahwa DAU tahun-tahun sebelumnya berpengaruh terhadap belanja daerah. Ketika dibandingkan, regresi tanpa *lag* lebih kuat dalam mempengaruhi belanja daerah dibandingkan regresi dengan *lag*. Hal ini menunjukkan bahwa DAU tahun ini lebih berpengaruh terhadap belanja daerah dibandingkan DAU tahun lalu. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah kurang berhati-hati dalam menyusun anggaran belanjanya dan kurang mengambil pelajaran dari realisasi anggaran tahun yang telah lalu. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Sulistyawan (2004) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja pemerintah daerah, baik dilakukan regresi dengan atau tanpa *lag*. Hal ini menegaskan bahwa semakin besar DAU, semakin besar pula jumlah belanja pemerintah daerah yang dikeluarkan.

Hasil pengujian hipotesis juga mendukung hipotesis 2a yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa PAD secara statistik berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja daerah, yang ditunjukkan dengan probabilitas < 0.05 yaitu 0.000. Hipotesis 2b sampai 2d juga didukung oleh hasil penelitian ini, yang menyatakan bahwa PAD tahun-tahun sebelumnya berpengaruh terhadap belanja daerah. Ketika dibandingkan, regresi tanpa *lag* lebih kuat dalam mempengaruhi belanja daerah dibandingkan regresi dengan *lag*. Hal ini menunjukkan bahwa PAD tahun ini lebih berpengaruh terhadap belanja daerah tahun ini dibandingkan PAD tahun-tahun lalu. Terdapat indikasi bahwa pemerintah daerah kurang berhati-hati dalam menyusun anggaran belanjanya dan kurang mengambil pelajaran dari realisasi anggaran tahun yang telah lalu. Hasil ini menunjukkan kesesuaian dengan yang diungkapkan oleh Sulistyawan (2004). DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja pemerintah daerah, baik dilakukan regresi dengan atau tanpa *lag*. Semakin besar DAU maka semakin besar pula jumlah belanja pemerintah daerah yang dikeluarkan.

Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap belanja daerah didukung oleh bukti empiris dalam penelitian ini. Koefisien DAU lebih besar daripada koefisien PAD sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap belanja daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa banyak daerah masih tergantung dengan dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat di dalam mengatur rumah tangga daerah. Tambahan pula, selama kurang lebih sembilan tahun pelaksanaan otonomi daerah, data menunjukkan bahwa belum ada perkembangan yang signifikan atas usaha pemerintah daerah untuk membangun kemandirian keuangan daerah. Porsi PAD yang merupakan salah satu komponen kemandirian daerah ternyata belum mampu ditingkatkan oleh pemerintah daerah, apalagi untuk menutup pembelanjaan pemerintah daerah.

B. KETERBATASAN

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengalami beberapa keterbatasan, seperti berikut ini.

1. Data DAU, PAD dan belanja daerah pada beberapa daerah mempunyai nilai yang sangat ekstrim, sehingga data seperti itu harus dihilangkan dalam penelitian. Hal ini mengakibatkan berkurangnya sampel penelitian.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada DAU dan PAD. Peneliti belum menguji variabel independen lain yang mungkin berpengaruh terhadap belanja daerah.
3. Beberapa data gagal untuk diunduh. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh kesalahan teknis saat pengunggahan ataupun pengunduhan. Beberapa data yang berhasil diunduh tidak lengkap, tidak disertai halaman pendapat, dan terdapat angka-angka yang hilang.
4. Data yang diunduh sewaktu-waktu dapat berubah karena terjadi penambahan atau pengurangan data oleh webmaster BPK. Oleh karena itu, peneliti membatasi waktu pengunduhan yaitu mulai 1 Mei -30 Mei 2009.

C. SARAN

1. Penelitian di bidang serupa hendaknya dilakukan secara berkelanjutan sehingga menghasilkan bukti

- empiris yang cukup akurat sehingga dapat memberikan kontribusi pada bidang akuntansi.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas variabel-variabel independen (selain DAU dan PAD) yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran daerah, yang kemungkinan mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
 3. Beberapa data tidak dapat diunduh dengan sempurna. Kemungkinan hal ini terjadi karena data tidak sempurna ketika diunggah. Pengelola website disarankan untuk memperbaiki kerusakan sehingga data dapat digunakan oleh masyarakat yang membutuhkannya. Pengguna data juga mempunyai kewajiban untuk memberikan saran kepada pengelola website sehingga mereka dapat meningkatkan pelayanan publik.

D. IMPLIKASI

Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh DAU dan PAD tahun ini lebih kuat daripada pengaruh DAU dan PAD tahun-tahun sebelumnya terhadap belanja daerah. Indikasi yang muncul adalah pemerintah daerah kurang berhati-hati dalam menyusun anggaran belanjanya dan kurang mengambil pelajaran dari realisasi anggaran tahun yang telah lalu.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaruh DAU lebih besar daripada PAD terhadap belanja daerah. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pemerintah pusat untuk lebih giat menggali informasi mengenai potensi daerah dalam mengoptimalkan PAD-nya. Tujuannya adalah mendorong kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah diharapkan juga melakukan hal yang serupa dengan mendorong upaya meningkatkan potensi daerah dan meningkatkan PAD-nya. Pemerintah daerah diharapkan tidak terlena dengan pemberian dana dari pusat karena hal tersebut menjadikan pemerintah daerah tidak kreatif dalam memaksimalkan PAD-nya. PAD dapat ditingkatkan dengan cara memanfaatkan potensi-potensi daerah, misalnya dari pajak dan retribusi yang sewajarnya dari berbagai bidang. Pajak dan retribusi yang tinggi dalam jangka pendek mungkin mampu meningkatkan PAD, namun tidak dalam jangka panjang. Pajak dan retribusi yang tinggi justru akan membebani masyarakat sehingga tujuan peningkatan PAD dalam jangka panjang tidak dapat tercapai.

Penelitian ini juga diharapkan juga mampu mendorong pemerintah daerah untuk menciptakan suasana kondusif yang akan memunculkan peluang-peluang usaha baru dan merangsang pertumbuhan sektor riil. Suasana yang kondusif akan sangat berpengaruh dalam menarik para investor untuk datang dan menanamkan modal di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukry, dan Abdul Halim. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. *Symposium Nasional Akuntansi Surabaya Oktober 2003*.
- Abdullah, Syukry, dan Asmara. 2006. Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah. *Symposium Nasional Akuntansi IX*.
- Adi, Priyo. 2005. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali. *Jurnal Interdisipliner UKSW*.
- _____. 2008. Relevansi Transfer Pemerintah Pusat dengan Upaya Pajak Daerah. *The 2nd National Conference UKWMS*.
- Arifin, Bustanil. 2001. DAU, Transfer Fiskal, dan Keadilan Ekonomi.

- Available at: <http://www.indef.or.id/xplod/upload/arts/DAU-1.pdf>
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2009. Laporan Hasil Pemeriksaan. Available at: <http://www.bpk.go.id>.
- Dollery, dan Worthington. 1995. Federal Expenditure and Fiscal Illusion: An Australian Test of The Flypaper Hypothesis. *The Journal of Federalism* 25.
- Garson, David. 2008. Multiple Regression. Available at: <http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/PA765/regress.htm>.
- Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.
- Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hines, James R., dan Thaler. 1995. Anomalies: The Flypaper Effect. *The Journal of Economic Perspective*, Volume 9, Number 4.
- Isdijoso, B dan T. Wibowo. 2002. Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah: Studi Kasus pada Sektor Pendidikan di Kota Surakarta. *Kajian Ekonomi dan keuangan*, Vol. 6, No. 1.
- Junanto, D. 2002. Penerapan Desentralisasi Fiskal Untuk Meningkatkan Sektor Pariwisata. Available at: http://priyohari.files.wordpress.com/2009/06/penerapan_desentralisasi_fiskal_untuk_meningkatkan_sektor_pariwisata.pdf
- Kuncoro. 2007. Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. *Symposium Nasional Akuntansi X Makassar*.
- Kusumadewi, Diah Ayu, dan A. Rahman. 2007. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *JAAI, Juni 2007, Vol. 11, No. 1, pp. 67-80*.
- Mahendra, Ngurah. 2009. Dampak Dari Otonomi Daerah. Available at: <http://ngurahmahendra.wordpress.com/2009/05/page/2/>
- Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIMYKPN. Yogyakarta
- Maimunah, Mutiara. 2006. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra. *Symposium Nasional Akuntansi IX*.
- Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mindarti, Lely. 2009. Tranfer Dana Pusat, Mobilisasi PAD, dan Demokrasi Lokal. Available at: <http://priyohari.files.wordpress.com/2009/06/transfer-dana-pusat-mobilisasi-pad-dan-demokrasi-lokal.pdf>
- Ndadari, L., dan P. Adi. 2008. Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat. *The 2nd National Conference UKWMS*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- _____, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- _____, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- _____, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Setiaji, Wirawan, dan P. Adi. 2007. Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali). *Symposium Nasional Akuntansi X Makassar 26-28 Juli 2007*.
- Sitohang, Petrus M. 2009. APBD dan Anomali Otonomi Daerah. Available at: <http://www.formatnews.com/?act=view&newsid=39062&cat=54>
- Sugiyono. 1999. Metode Penelitian Bisnis. CV. Alfabeta. Bandung.
- Sulistiyawan, Eko. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera. *Symposium Nasional Akuntansi*.
- Suminto. 2003. Beberapa Catatan Tiga Tahun Desentralisasi Fiskal. *Majalah Anggaran*, edisi khusus Hari Keuangan 2003.